

**PENGENDALIAN INFLASI DALAM UPAYA STABILITAS EKONOMI OLEH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DI KOTA BAUBAU**

La Ode Muh. Yassin Arif Basari

NPP. 32.0933

Asdaf Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: 32.0933@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on how inflation control is carried out against the high inflation rate and also as one of the regions that will be the highest contributor to inflation in 2024. **Purpose:** This study aims to analyze inflation control in an effort to economic stability by the Department of Industry and Trade in Baubau City. **Methods:** This study uses an inductive approach with a descriptive method through data collection techniques in the form of interviews with predetermined informants through purposive sampling techniques, direct observation in the field, and documentation in the form of data in the form of diaries and photos, and by using 4 (four) stages of management, namely Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. **Results/Findings:** The results of this study show that inflation control carried out in Baubau City in its implementation has several supporting factors that affect the level of effectiveness of activities including the availability of accurate price data, good coordination with related parties such as food distributors, and the active role of the Regional Inflation Control Team (TPID). However, there are inhibiting factors that include limited distribution of goods, extreme weather conditions, and low awareness among some traders in maintaining price stability. In order to overcome these inhibiting factors, the Department of Industry and Trade made concrete efforts, such as intensifying market inspections, cooperation with various parties, and socialization of business actors. **Conclusion:** The inflation control carried out has been carried out well in accordance with the roles and functions of each section through a theoretical approach, but still faces obstacles, and emphasizes the importance of institutional strengthening and cross-sector coordination in realizing regional economic stability through planned and sustainable inflation control.

Keywords: Inflation, Economic Stability, Control, Management, Baubau City

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang(GAP): Penulis berfokus pada bagaimana pengendalian inflasi yang dilakukan terhadap tingkat inflasi yang tinggi dan juga sebagai salah satu daerah yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi tahun 2024. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian inflasi dalam upaya stabilitas ekonomi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Baubau. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap informan yang telah ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi berupa data dalam bentuk catatan harian maupun foto, serta dengan menggunakan 4 (empat) tahapan manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengendalian). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi yang dilakukan di Kota Baubau yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat efektivitas kegiatan yang meliputi ketersediaan data harga yang akurat, koordinasi yang baik dengan pihak terkait seperti distributor pangan, dan peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Namun, terdapat faktor penghambat yang meliputi keterbatasan distribusi barang, kondisi cuaca yang ekstrem, serta rendahnya kesadaran sebagian pedagang dalam menjaga stabilitas harga. Guna mengatasi faktor penghambat tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya konkret, seperti intensifikasi sidak pasar, kerja sama dengan berbagai pihak, dan sosialisasi terhadap pelaku usaha. **Kesimpulan:** Pengendalian inflasi yang dilakukan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing bagian melalui pendekatan teoretis, namun masih menghadapi hambatan, serta menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi yang terencana dan berkelanjutan.

Kata kunci: Inflasi, Stabilitas Ekonomi, Pengendalian, Manajemen, Kota Baubau

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan berkembang seiring berjalannya waktu. Adapun konsep ilmu pemerintahan yang dikemukakan oleh Rasyid dalam Labolo, M (2014) yang terbagi menjadi empat fungsi pemerintahan, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pengaturan (*regulation*) yang mengemukakan bahwa “untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya”, yang berarti fungsi pemerintahan itu dilaksanakan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahannya. Kemudian, apabila berjalan dengan baik maka tugas pokok selanjutnya yakni bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, kemandirian, serta kemakmuran. Kaitannya dengan inflasi yakni pemerintah daerah memiliki beberapa kebijakan tersendiri dalam mengatasi hal tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, isu inflasi di Indonesia menjadi topik perdebatan yang serius, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi sendiri mengacu pada kenaikan harga umum barang dan jasa secara terus-menerus dalam suatu perekonomian. Jika tidak dikendalikan, inflasi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Menurut Pangesti dan Susanto (2018), inflasi merupakan indikator makroekonomi yang selalu menjadi perhatian karena mempengaruhi daya beli dan stabilitas harga. Pemerintah Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Soekapdjo dan Oktavia (2021), telah menerapkan berbagai strategi pengendalian inflasi, seperti kebijakan moneter, fiskal, serta intervensi pada pasokan dan distribusi barang. Akan tetapi, dalam praktiknya, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kondisi regional dan keterhubungan antarwilayah, termasuk kapasitas produksi dan stabilitas akses pasar (Yenni et al., 2019). Fenomena inflasi yang terjadi di

Indonesia selama periode November 2023 hingga Agustus 2024 merefleksikan kompleksitas pengendalian harga. Inflasi yang tidak terkendali tidak hanya merugikan konsumen dengan menurunkan daya beli, tetapi juga merugikan produsen melalui ketidakpastian harga dan tekanan terhadap profitabilitas. Hal ini berdampak pada kestabilan perekonomian nasional dan menurunkan potensi pertumbuhan. Studi yang dilakukan oleh Kumaranayake (2000) menunjukkan bahwa data ekonomi yang tidak disesuaikan terhadap inflasi dapat menyesatkan pengambilan keputusan, terutama dalam konteks kebijakan sosial dan kesehatan. Oleh karena itu, akurasi dan relevansi data menjadi faktor penting dalam evaluasi program berbasis bukti.

Lebih jauh, kerangka *inflation targeting* yang telah diterapkan di berbagai negara turut menjadi sorotan dalam literatur. De Mendonça (2007) menemukan bahwa meskipun strategi ini bertujuan membangun kredibilitas, implementasinya di Brasil belum sepenuhnya efektif. Sementara Capistrán dan Ramos-Francia (2010) menunjukkan bahwa kerangka ini dapat menurunkan dispersi ekspektasi inflasi, terutama di negara berkembang, menandakan meningkatnya stabilitas ekspektasi publik terhadap harga di masa depan. Analisis oleh Clarida et al. (2000) tentang kebijakan moneter di Amerika Serikat memperkuat pentingnya pendekatan *forward-looking*, di mana otoritas moneter merespons ekspektasi inflasi secara aktif untuk menciptakan stabilitas harga. Sementara Hibbs (1977) menyoroti dimensi politik dalam kebijakan ekonomi, dengan menunjukkan bahwa preferensi partai politik dapat mempengaruhi arah kebijakan, baik terhadap inflasi maupun pengangguran. Model teoritis Barro dan Gordon (1983a; 1983b) juga memberi kontribusi penting dalam perdebatan antara kebijakan berbasis aturan versus diskresi. Mereka menekankan bahwa dalam rezim diskresi, otoritas memiliki insentif untuk menciptakan kejutan inflasi, namun hal ini berisiko menurunkan kredibilitas jika ekspektasi pelaku ekonomi bersifat rasional. Oleh karena itu, mereka mendorong pentingnya penerapan aturan dan komitmen jangka panjang untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Primiceri (2005) turut memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa meskipun perilaku kebijakan moneter berubah dari waktu ke waktu, dampaknya terhadap ekonomi makro tetap dibatasi oleh kejutan eksogen yang lebih dominan. Ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya persoalan teknis kebijakan, tetapi juga membutuhkan respons yang komprehensif terhadap dinamika eksternal. Di tingkat lokal, kasus Kota Baubau menjadi cerminan tantangan pengendalian inflasi di daerah. Kota ini tercatat sebagai penyumbang inflasi tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024, dengan angka mencapai 3,21 persen (Badan Pusat Statistik Kota Baubau, 2025). Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut serta dinamika pasokan yang tidak stabil menyebabkan harga barang menjadi rentan terhadap fluktuasi. Di sisi lain, masih lemahnya perencanaan terintegrasi, koordinasi antarinstansi, strategi pengendalian yang belum maksimal, serta kurangnya evaluasi komprehensif memperburuk situasi tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang pengendalian inflasi dan kebijakan moneter di tingkat nasional dan internasional. Misalnya, Kumaranayake (2000) menekankan pentingnya penyesuaian inflasi pada data ekonomi untuk pengambilan keputusan kebijakan yang akurat, sementara de Mendonça (2007) mengevaluasi efektivitas kerangka *inflation targeting* di Brasil dengan hasil yang masih menunjukkan keterbatasan dalam membangun kredibilitas kebijakan.

Capistrán dan Ramos-Francia (2010) juga menemukan bahwa penerapan *inflation targeting* berpengaruh pada penurunan dispersi ekspektasi inflasi di negara berkembang, yang mengindikasikan stabilitas ekspektasi jangka panjang. Namun, meskipun berbagai kajian tersebut memberikan gambaran penting di tingkat makro dan nasional, terdapat kekosongan dalam studi yang memfokuskan analisis pada tingkat lokal, khususnya di daerah dengan karakteristik ekonomi unik seperti Kota Baubau. Kondisi ketergantungan masyarakat pada sumber daya laut serta fluktuasi pasokan barang di pasar lokal yang dinamis belum banyak diulas dalam literatur (Badan Pusat Statistik Kota Baubau, 2025).

Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh Primiceri (2005) dan Barro & Gordon (1983a, 1983b), kebijakan moneter yang efektif sangat bergantung pada penerapan aturan yang konsisten dan

kredibel. Namun, tantangan pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah, termasuk perencanaan yang kurang terintegrasi dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal, masih menjadi hambatan yang jarang dianalisis secara mendalam dalam konteks daerah seperti Baubau.

Hibbs (1977) menunjukkan bahwa orientasi politik juga dapat memengaruhi kebijakan ekonomi, suatu aspek yang perlu diperhatikan mengingat keragaman dan kompleksitas politik lokal yang bisa mempengaruhi efektivitas pengendalian inflasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi secara komprehensif pengendalian inflasi di Kota Baubau, menggabungkan kajian data ekonomi lokal yang diperbarui (sebagaimana ditekankan Kumaranayake, 2000), evaluasi efektivitas strategi pengendalian inflasi yang diterapkan, serta tantangan koordinasi dan implementasi yang dihadapi di tingkat daerah.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris yang konkret untuk mengembangkan strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif dan kontekstual di daerah dengan karakteristik spesifik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kebijakan moneter, volatilitas makroekonomi, dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi fokus kajian ilmiah sejak beberapa dekade terakhir. Clarida et al. (1998) meneliti fungsi reaksi kebijakan moneter pada negara-negara G3 (Jerman, Jepang, dan AS) dan E3 (UK, Prancis, dan Italia). Mereka menemukan bahwa bank sentral G3 cenderung menerapkan *inflation targeting* secara implisit dan bersifat *forward-looking*, berbeda dengan E3 yang lebih dipengaruhi oleh kebijakan Bundesbank Jerman. Studi ini memperkuat argumen bahwa *inflation targeting* lebih efektif dibanding sistem nilai tukar tetap sebagai jangkar nominal kebijakan moneter.

Fischer (1993) menyajikan hubungan antara faktor-faktor makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Ia menunjukkan bahwa inflasi tinggi, defisit anggaran besar, dan distorsi pasar valuta asing berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Inflasi terbukti menghambat investasi dan pertumbuhan produktivitas, menegaskan pentingnya stabilitas makroekonomi untuk pertumbuhan jangka panjang.

Gali dan Monacelli (2005) mengembangkan model ekonomi terbuka kecil dalam kerangka harga kaku ala Calvo. Mereka menunjukkan bahwa rezim kebijakan moneter yang berbeda, seperti *inflation targeting* domestik, *CPI-based Taylor rules*, dan sistem nilai tukar tetap, menghasilkan tingkat volatilitas nilai tukar yang berbeda. Mereka menekankan bahwa dalam kondisi tertentu, *domestic inflation targeting* dapat menjadi kebijakan yang optimal bagi negara kecil yang terbuka.

Dalam konteks Amerika Serikat pasca Perang Dunia II, Cogley dan Sargent (2005) menunjukkan bahwa koefisien kebijakan moneter dan volatilitas inflasi mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu. Melalui model *VAR* dengan koefisien melayang dan volatilitas stokastik, mereka menemukan bahwa inflasi bersifat lebih persisten pada tahun 1970-an dan menurun pada dekade berikutnya. Ini menyoroti pentingnya kebijakan moneter adaptif terhadap kondisi ekonomi yang berubah.

Sims (1992) menelaah bukti empiris dari beberapa negara terhadap dampak kebijakan moneter menggunakan analisis deret waktu multivariat. Ia menemukan pola respons ekonomi terhadap kebijakan moneter yang serupa di berbagai negara, namun juga menemukan paradoks seperti kenaikan suku bunga yang justru memprediksi inflasi tinggi, menunjukkan kompleksitas dalam transmisi kebijakan moneter.

Erceg et al. (2000) mengembangkan model kontrak upah dan harga yang kaku secara nominal dan menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak dapat mencapai keseimbangan Pareto. Mereka menyoroti adanya *trade-off* antara stabilisasi output, inflasi harga, dan inflasi upah, serta menemukan bahwa penargetan inflasi harga yang ketat justru dapat menghasilkan kerugian kesejahteraan yang besar.

Rotemberg dan Woodford (1997) menawarkan kerangka ekonometrika berbasis optimisasi untuk mengevaluasi aturan kebijakan moneter di AS. Mereka menemukan bahwa aturan kebijakan yang mampu menstabilkan inflasi secara optimal memerlukan suku bunga yang sangat fleksibel. Namun, bahkan dalam kebijakan optimal yang dibatasi (*constrained-optimal*), stabilisasi inflasi tetap

lebih tinggi dibandingkan dengan kebijakan aktual.

Acemoglu et al. (2003) mengkaji bagaimana kelemahan institusional memengaruhi ketidakstabilan makroekonomi. Mereka menyatakan bahwa negara dengan warisan institusi kolonial yang eksploitatif cenderung mengalami krisis dan volatilitas tinggi. Dalam konteks ini, kebijakan makroekonomi yang distorsif dianggap lebih sebagai gejala kelemahan institusi daripada penyebab utama dari ketidakstabilan.

Lucas dan Stokey (1983) meneliti konsistensi waktu dari kebijakan fiskal dan moneter optimal dalam perekonomian tanpa modal. Mereka menunjukkan bahwa dalam perekonomian moneter, adanya kebutuhan untuk membebankan "pajak inflasi" menyebabkan kebijakan optimal menjadi tidak konsisten waktu, sehingga menekankan pentingnya komitmen terhadap aturan kebijakan untuk menghindari distorsi insentif jangka pendek.

Svensson (1997) menegaskan bahwa *inflation forecast targeting* dapat menyederhanakan implementasi dan pengawasan kebijakan moneter. Ia menyatakan bahwa penargetan inflasi lebih unggul dibanding penargetan pertumbuhan uang atau nilai tukar, dan bahwa komitmen terhadap *target rules* lebih baik daripada *instrument rules* dalam menjamin efektivitas kebijakan.

Selain itu, Rizani dkk. (2023) meneliti dampak perubahan tingkat inflasi terhadap fluktuasi daya beli masyarakat di Indonesia dengan fokus pada aspek makroekonomi. Studi ini menegaskan bahwa peningkatan inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang berdampak pada penurunan daya beli, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Variabilitas pola hubungan antara inflasi dan daya beli dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi tingkat inflasi. Respons konsumen terhadap perubahan inflasi, termasuk penyesuaian pola konsumsi dan pencarian alternatif lebih murah, merupakan bagian penting dalam dinamika tersebut. Variabel makroekonomi seperti suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran turut membentuk interaksi antara inflasi dan daya beli. Studi ini memberikan pemahaman holistik yang penting bagi perancangan kebijakan ekonomi yang responsif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada desain institusional, kredibilitas, dan kemampuan adaptasi kebijakan terhadap kondisi ekonomi yang dinamis. Stabilitas harga melalui *inflation targeting* dan kebijakan berbasis aturan menjadi pendekatan yang sering terbukti unggul dalam mengelola ekspektasi, meminimalkan volatilitas, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Clarida et al. (1998), Fischer (1993), Gali dan Monacelli (2005), serta para ahli lainnya telah secara komprehensif mengkaji berbagai aspek kebijakan moneter, khususnya *inflation targeting*, volatilitas makroekonomi, dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai konteks negara maju maupun berkembang. Misalnya, Clarida et al. (1998), menegaskan bahwa *inflation targeting* dengan pendekatan *forward-looking* lebih efektif dibandingkan sistem nilai tukar tetap dalam mengendalikan inflasi di negara maju G3, sedangkan Fischer menghubungkan inflasi tinggi dengan hambatan pertumbuhan ekonomi. Gali dan Monacelli memperkuat argumen tersebut dalam konteks negara kecil terbuka, menunjukkan bahwa *domestic inflation targeting* dapat meminimalisir volatilitas nilai tukar. Namun, meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan wawasan penting tentang efektivitas kebijakan moneter di tingkat makro dan lintas negara, sebagian besar fokusnya tetap pada konteks makro nasional atau internasional, dengan asumsi bahwa struktur institusi dan kapasitas adaptasi kebijakan sudah cukup matang. Studi seperti Cogley dan Sargent (2005) dan Sims (1992) menunjukkan bahwa kompleksitas dinamika kebijakan moneter memerlukan respons adaptif, namun masih terbatas pada analisis negara maju dengan data agregat. Sementara itu, penelitian Acemoglu et al. (2003) dan Lucas dan Stokey (1983) mengingatkan pentingnya faktor kelemahan institusional dan konsistensi kebijakan sebagai faktor fundamental dalam menentukan efektivitas dan kestabilan makroekonomi, yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam penerapan kebijakan di negara berkembang atau daerah dengan kondisi ekonomi khusus. Dalam konteks ini, Rizani dkk. (2023) menambahkan perspektif penting

dengan meneliti dampak perubahan tingkat inflasi terhadap daya beli masyarakat di Indonesia secara makroekonomi. Rizani dkk. (2023) mengungkapkan bahwa peningkatan inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang signifikan, sehingga menurunkan daya beli, terutama di kalangan kelompok berpendapatan rendah. Studi ini menyoroti bagaimana pola respons konsumen terhadap inflasi, seperti penyesuaian pola konsumsi dan pencarian alternatif lebih murah, berperan penting dalam menjaga daya beli. Selain itu, variabel makroekonomi seperti suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran turut mempengaruhi hubungan antara inflasi dan daya beli. Temuan ini menggarisbawahi perlunya kebijakan moneter yang responsif dan adaptif pada konteks lokal, terutama dalam menghadapi volatilitas inflasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis kebijakan moneter, khususnya *inflation targeting*, dengan konteks kelembagaan dan karakteristik ekonomi lokal yang spesifik, seperti yang terjadi di daerah dengan ketergantungan tinggi pada sumber daya alam dan volatilitas pasar yang dinamis (misal Kota Baubau). Selain itu, penelitian ini menyoroti kebutuhan evaluasi yang lebih rinci terhadap bagaimana kebijakan moneter diimplementasikan secara adaptif di tingkat lokal, di tengah tantangan kelembagaan, koordinasi antar pihak, dan kapasitas pengawasan yang belum optimal—dimensi yang belum banyak dijangkau oleh studi sebelumnya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pengendalian inflasi dalam upaya stabilitas ekonomi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk memahami dinamika pengendalian inflasi di tingkat daerah. Pendekatan ini sejalan dengan **Simangunsong (2017)**, yang menekankan pentingnya pemilihan metode yang sesuai dengan karakteristik fenomena pemerintahan, dengan menggabungkan pendekatan teoritik, legalistik, empirik, dan inovatif guna memperoleh gambaran yang holistik dan mendalam terhadap persoalan kebijakan publik di daerah. Adapun pendapat lain oleh **Nurdin & Hartati (2019)** menyatakan bahwa pendekatan kualitatif penting digunakan dalam penelitian ekonomi publik karena mampu menggali dinamika struktur dan kebijakan yang tak tertangkap oleh metode kuantitatif semata. Penelitian ini juga melalui pendekatan induktif yang merupakan penelitian kualitatif dan menganalisis data melalui konsep triangulasi data yakni dengan mereduksi data, menyajikan data, dan melakukan penarikan kesimpulan (Huberman, M. & M., 1994: 10-12). Dalam penelitian kualitatif ini Creswell menjelaskan bahwa peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk meningkatkan pemahaman disekitar terkait pokok masalah melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi (Creswell, 2015).

Penulis mengumpulkan beberapa data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kota Baubau, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bagian Perekonomian Kota Baubau, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau, Kepala Bidang Perdagangan, Staff Bidang Pengendalian Inflasi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat/Konsumen (sebanyak 2 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry (Terry, 2010) yang menyatakan bahwa manajemen terdiri dari empat tahapan, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengendalian).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis dan mendeskripsikan pengendalian inflasi dalam upaya stabilitas ekonomi di Kota Baubau menggunakan pendapat dari George R. Terry (2010) yang menyatakan bahwa manajemen terdiri dari empat tahapan, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian),

actuating (pelaksanaan), dan *controlling* (pengendalian). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab sebagai berikut:

3.1. Planning (Perencanaan)

Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, diperlukan perencanaan yang berbasis data yang akurat dan relevan. *Planning* atau perencanaan merupakan tahap atau bagian utama yang mencakup penetapan dan penyusunan strategi serta penentuan tujuan, metode, sumber daya, dan waktu yang dibutuhkan. Dengan adanya tahap perencanaan ini, Pemerintah Daerah terkhusus Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau telah menerapkan rencana strategis dalam menghadapi tantangan inflasi yang jelas. Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menetapkan strategi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas perekonomian. Inflasi yang terjadi di Kota Baubau muncul dari berbagai aspek yang ada sehingga menyebabkan terjadinya lonjakan kenaikan harga di beberapa toko ataupun pasar.

Tabel 1. Perubahan Harga Komoditas Pokok Dan Pangan Per Tahun 2024

No.	Kebutuhan Pokok	Satuan	01-Jan-2024	31-Dec-2024	Perbandingan	
1	Cabe Rawit Merah	Kg	131.650	51.659	-1.5485	Turun
2	Beras Medium	Kg	13.258	13.634	0.0276	Naik
3	Beras Premium	Kg	14.833	15.234	0.0263	Naik
4	Gula Pasir	Kg	18.000	18.150	0.0083	Naik
5	Minyak Goreng Kemasan Premium	Liter	21.000	23.000	0.087	Naik
6	Minyak Goreng, MINYAKITA	Liter	16.000	17.492	0.0853	Naik
7	Daging Ayam Ras	Kg	46.400	46.448	0.001	Naik
8	Tepung Terigu	Kg	14.000	12.834	-0.0909	Turun
9	Daging Sapi Paha Belakang	Kg	140.000	150.000	0.0667	Naik
10	Telur Ayam Ras	Kg	29.100	31.380	0.0727	Naik
11	Cabai Merah Besar	Kg	65.000	62.484	-0.0403	Turun
12	Cabai Merah Keriting	Kg	65.000	52.484	-0.2385	Turun
13	Kedelai Impor	Kg	19.000	19.000	0	—
14	Bawang Merah	Kg	34.333	48.317	0.2894	Naik
15	Bawang Putih	Kg	42.483	48.317	0.1208	Naik
16	Ikan Kembung	Kg	26.825	25.659	-0.0455	Turun
17	Ikan Tuna	Kg	16.325	28.317	0.4235	Naik
18	Ikan Cakalang	Kg	26.650	24.984	-0.0667	Turun
19	Jagung	Liter	11.000	6.317	-0.7413	Turun
20	Tomat	Kg	28.000	17.817	-0.5715	Turun

Sumber: Website Safikri dan Dinas Perindag Kota Baubau

Pada **Tabel 1** perubahan harga komoditas tersebut dapat diketahui sebagian komoditas pokok dan pangan telah mengalami deflasi, salah satu komoditas yang mengalami deflasi secara signifikan yakni cabai rawit merah dengan perbandingan yang sangat besar pada awal tahun 2024 hingga akhir tahun 2024. Dikarenakan masih banyaknya komoditas yang mengalami kenaikan inflasi, pemerintah daerah khususnya dinas perindustrian dan perdagangan Kota Baubau selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, yaitu melakukan sidak pasar secara langsung dalam memantau harga barang dan pangan, melakukan operasi pasar murah yang bertujuan untuk menstabilkan pasokan barang dan pangan, dan menekan harga minyak goreng melalui program MinyakKita.

Penulis juga menemukan terdapat hambatan yang dinilai mempengaruhi efektifitas perencanaan kegiatan, yakni belum adanya perencanaan jangka panjang yang menyeluruh sehingga

perencanaan masih bersifat reaktif. Meskipun secara umum terjadi tren penurunan harga, tetap diperlukan strategi perencanaan yang cermat untuk mencegah lonjakan harga pada komoditas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

3.2. Organizing (Pengorganisasian)

Organizing atau pengorganisasian merupakan tahap yang dimana mencakup pengelompokkan dan koordinasi antar unit yang bertujuan agar memastikan efektif atau tidaknya implementasi program pengendalian inflasi. Dalam tahap ini, pemerintah daerah Kota Baubau mengelompokkan beberapa bagian dalam mengendalikan laju inflasi yang terjadi, dengan berfokus pada pemantauan atau monitoring pada harga-harga barang, menangani masalah koordinasi dengan pihak terkait, serta mengurus persoalan distribusi barang. Pengelompokkan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian dan juga memiliki peran spesifik yang sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Struktur kerja yang kolaboratif ini menjadi elemen penting dalam mendeteksi lebih dini potensi gejolak harga dan memastikan kebijakan intervensi dapat dieksekusi secara cepat dan tepat sasaran.

Pada dimensi ini, penulis menyimpulkan bahwa pembagian tugas yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dinas tersebut dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau. Pembagian tugas ini memungkinkan koordinasi antarinstansi berjalan lebih sinergis, sehingga pelaksanaan kegiatan seperti pasar murah, pemantauan harga, dan distribusi kebutuhan pokok dapat dilakukan secara terarah dan tepat waktu. Penulis juga menemukan bahwa dalam tahap pengorganisasian ini keterbatasan SDM yang kompeten menjadi faktor kendala tersendiri.

3.3. Actuating (Pelaksanaan)

Pelaksanaan dalam hal ini mengacu pada implementasi program kegiatan yang telah disusun berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, yakni fluktuasi harga yang tidak stabil per tahunnya. Rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi dilakukan secara rutin guna mendapatkan solusi mengenai permasalahan yang dihadapi. Melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama yang dilaksanakan via *zoom* oleh kementerian dalam negeri yang dipimpin langsung oleh bapak menteri dalam negeri, dinyatakan bahwa Kota Baubau masih menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar Pulau Sulawesi. Penyebab tingginya laju inflasi tersebut diakibatkan oleh tingginya permintaan dan pasokan ikan segar yang melimpah namun harga yang terdapat di pasaran melambung tinggi. Hal ini juga diakibatkan berbagai macam faktor, salah satunya adalah iklim Kota Baubau yang tidak menentu. Dalam rapat koordinasi tersebut juga disampaikan bagaimana pemerintah daerah Kota Baubau berupaya dalam mengendalikan laju inflasi dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Melakukan Sidak Pasar Dalam Memantau Harga

Strategi pengawasan atau sidak pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Baubau bertujuan untuk memantau dan mengawasi bagaimana kondisi yang terjadi di pasar terutama dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan yang cukup di pasar atau tempat perdagangan lainnya. Dalam konteks ini, sidak pasar juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap praktik perdagangan yang merugikan konsumen, seperti penetapan harga yang tidak wajar. Disamping itu juga dapat memperkuat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena dilihat adanya upaya konkret yang ditunjukkan untuk menjaga harga tetap stabil dari terjadinya fluktuasi harga.

Tabel 2. Rata-rata Harga Ikan Segar Tahun 2022 s.d. 2024 (Rp/Kg)

Bulan	2022	2023	2024
Januari	19.600	21.765	21.639

Februari	20.531	20.647	21.278
Maret	20.406	20.941	21.056
April	20.188	21.176	21.889
Mei	20.867	22.588	22.722
Juni	22.267	23.000	23.105
Juli	22.313	23.588	24.053
Agustus	22.294	22.706	24.842
September	22.412	22.471	24.684
Oktober	21.765	21.353	24.053
November	21.471	21.853	24.158
Desember	22.118	21.647	24.632
Rata-rata	21.352	21.978	23.176

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Baubau 2025

Pada **Tabel 2** tersebut diketahui bahwa perkembangan harga ikan segar dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Rata-rata harga ikan segar pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp.21.352/kg, meningkat menjadi Rp.21.978/kg pada tahun 2023, dan kembali mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024 sebesar Rp.23.176/kg. Kenaikan harga yang terjadi hampir di setiap bulan menandakan adanya tekanan harga yang terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut juga bahwa pemerintah daerah Kota Baubau melalui tim pengendalian inflasi daerah yang dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan melakukan pemantauan secara rutin guna mengetahui perubahan harga yang terjadi di beberapa pasar yang ada meliputi pengecekan terhadap ketersediaan pasokan barang pokok serta memonitoring perubahan harga yang terjadi.

Penulis menyimpulkan bahwa sidak pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Baubau yang dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan sudah optimal dalam menekan harga komoditas pangan yang mengalami lonjakan inflasi. Pemerintah juga menginginkan agar harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil tiap tahunnya agar pemenuhan semua kebutuhan terus terpenuhi.

2. Membuat Operasi Pasar Murah

Pasar murah merupakan kegiatan yang dilakukan dinas perindustrian dan perdagangan Kota Baubau dalam upaya mengendalikan laju inflasi agar terjaganya stabilitas ekonomi yang diinginkan. Pasar murah juga bisa diartikan sebagai sebuah strategi yang digunakan guna menjaga keseimbangan pasar dan mengurangi peningkatan harga akibat tingginya permintaan distribusi, serta bertujuan untuk mendistribusikan barang kebutuhan pokok lebih merata dengan harga terjangkau.

Tabel 3. Komoditas Pangan yang Tersedia pada Pasar Murah

No.	Komoditas	Satuan	Harga (Rp)
1.	Beras Premium 5 kg	KG	75.000
2.	Beras Premium Anoa 10 kg	KG	143.000
3.	Beras Anak Beruang 25 kg	KG	380.000
4.	Bawang Merah	KG	35.000
5.	Bawang Putih	KG	45.000
6.	Telur Ayam Ras	RAK	60.000
7.	Minyak Goreng Sonco 2 L	LITER	40.000
8.	Minyak Goreng Bimoli 2 L	LITER	45.000
9.	MinyaKita Premium 1 L	LITER	17.500

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau

Pada **Tabel 3** terkait data dari dinas perindustrian dan perdagangan Kota Baubau, program pasar murah yang diselenggarakan telah menyediakan berbagai komoditas pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga normal di pasaran. Program ini menawarkan sembilan jenis komoditas esensial yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Program ini juga

mencerminkan upaya serius Pemerintah Daerah dalam menstabilkan harga ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kegiatan ini dianggap efektif dan mampu dalam mengendalikan inflasi dan juga dapat membantu masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari rata-rata agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta bertujuan untuk menekan laju inflasi apabila terjadi lonjakan harga akibat adanya perayaan hari besar.

Penulis menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut merupakan sebuah langkah strategis dari pemerintah dalam upaya menstabilkan harga dan meringankan beban ekonomi masyarakat. Partisipasi dari masyarakat juga sangat antusias menggambarkan adanya aksesibilitas kebutuhan barang serta masyarakat memperoleh solusi konkret terhadap kebutuhan sehari-hari.

3. Koordinasi Antar Instansi Terkait

Koordinasi disini memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar. Berbagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab diharuskan bekerja sama dalam mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga barang. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah daerah juga penting untuk menjaga keseimbangan harga di pasar lokal. Diperlukan juga kolaborasi yang erat antar instansi agar berbagai informasi mengenai bagaimana kondisi pasar dapat tersampaikan serta strategi pencegahan dapat dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Tingkat keberhasilan dari adanya koordinasi ini, bukan hanya bergantung pada komunikasi yang efektif dan solid antar instansi melainkan juga pada penetapan kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan monitoring kondisi pasar secara efektif.

Penulis menemukan bahwa koordinasi yang dilakukan dapat mengidentifikasi tren inflasi yang terjadi dengan cepat serta mengimplementasikan langkah-langkah konkret dalam menangani isu-isu ekonomi dengan menerapkan prinsip 4K antara lain: keterjangkauan harga; ketersediaan pasokan barang; kelancaran distribusi; dan komunikasi efektif.

3.4. Controlling (Pengendalian)

Dalam praktiknya, pengendalian (*controlling*) juga merupakan proses yang berkelanjutan dimana kebijakan yang ditetapkan untuk memantau, mengevaluasi, dan bertindak sesuai perlu guna menjaga stabilitas harga dalam perekonomian. Dalam konteks pengendalian inflasi, pengendalian dan pengawasan harga komoditas merupakan langkah strategis untuk memastikan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Kegiatan ini mencakup monitoring rutin terhadap harga pasar, intervensi melalui operasi pasar murah, serta pengawasan distribusi barang agar tidak terjadi kelangkaan.

Penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa mekanisme dalam proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas dalam upaya menekan laju inflasi antara lain: evaluasi bulanan yang dilaksanakan melalui rapat tim pengendali inflasi daerah; evaluasi triwulan yang bertujuan untuk mengukur capaian kinerja dalam jangka pendek; dan evaluasi tahunan yang bertujuan untuk melihat kondisi secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan pengendalian harga yang telah dilaksanakan sepanjang tahun yang menjadi dasar untuk menentukan apakah langkah yang diambil sudah mampu menekan inflasi atau perlu dilakukan penyesuaian strategi.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di tingkat daerah, khususnya di Kota Baubau, menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, mulai dari kurangnya integrasi perencanaan, koordinasi antar pemangku kepentingan, hingga pemantauan dan evaluasi yang belum optimal. Kondisi ini berimplikasi pada volatilitas harga dan ketidakstabilan inflasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan temuan Clarida et al. (1998) yang menegaskan efektivitas kebijakan *inflation targeting* yang bersifat *forward-looking* dalam mengendalikan inflasi. Namun, penelitian mereka lebih banyak menyoroti konteks negara maju dengan institusi yang relatif kuat, sementara kondisi di Kota Baubau menggambarkan bagaimana kelemahan institusional dan koordinasi dapat menghambat efektivitas

kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi *inflation targeting* di daerah dengan kapasitas kelembagaan yang terbatas perlu disesuaikan agar kebijakan dapat berjalan efektif.

Selain itu, Fischer (1993) mengemukakan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak terkendali berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi melalui penurunan investasi dan produktivitas. Temuan ini juga relevan dengan situasi di Kota Baubau, di mana inflasi yang tidak stabil telah berpotensi menurunkan daya beli dan memengaruhi aktivitas ekonomi lokal, terutama karena ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut yang rentan terhadap fluktuasi pasar.

Gali dan Monacelli (2005) menggarisbawahi bahwa dalam kondisi negara kecil terbuka, domestic inflation targeting dapat menjadi kebijakan yang optimal untuk meminimalkan volatilitas nilai tukar dan harga. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan kelembagaan dan koordinasi yang baik, manfaat dari kebijakan tersebut sulit diwujudkan secara maksimal di tingkat daerah.

Penelitian Cogley dan Sargent (2005) yang menekankan perlunya kebijakan moneter adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi juga menemukan relevansi pada konteks ini. Kondisi ekonomi Kota Baubau yang dinamis dan bergejolak memerlukan strategi kebijakan yang responsif dan terkoordinasi dengan baik agar dapat menstabilkan inflasi. Temuan ini juga memperkuat argumen dari Acemoglu et al. (2003) mengenai pentingnya kekuatan institusi dalam menentukan stabilitas makroekonomi. Di daerah seperti Kota Baubau, kelemahan institusional menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan kebijakan pengendalian inflasi yang efektif.

Selain itu, Rizani dkk. (2023) menambah dimensi penting dalam diskusi ini dengan menyoroti bagaimana perubahan inflasi berdampak langsung pada daya beli masyarakat di Indonesia, terutama kelompok berpendapatan rendah. Dalam konteks Kota Baubau, di mana inflasi yang tidak stabil terjadi, penurunan daya beli ini akan semakin memperburuk kesejahteraan masyarakat. Rizani dkk. (2023) juga menegaskan perlunya respons kebijakan makroekonomi yang mempertimbangkan kondisi lokal, termasuk pengaruh suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran yang turut membentuk dinamika inflasi dan daya beli di tingkat daerah. Temuan ini mendukung pentingnya adaptasi kebijakan yang lebih sensitif terhadap karakteristik ekonomi dan sosial daerah. Akhirnya, diskusi ini mendukung teori Barro dan Gordon (1983b) tentang pentingnya komitmen kebijakan berbasis aturan untuk menjaga kredibilitas dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks pengendalian inflasi di daerah, hal ini menegaskan bahwa perencanaan dan implementasi kebijakan harus dilakukan secara konsisten dengan aturan yang jelas, serta diiringi pemantauan dan evaluasi yang ketat untuk menghindari ketidakpastian dan volatilitas yang merugikan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan moneter di tingkat daerah sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan kemampuan adaptasi kebijakan terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, penguatan institusi dan mekanisme pengawasan menjadi kunci untuk mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah-daerah dengan karakteristik ekonomi khusus seperti Kota Baubau.

3.6. Diskusi Topik Menarik Lainnya

Selain faktor kebijakan moneter dan koordinasi antar lembaga, dinamika pasokan dan perilaku konsumen di tingkat daerah juga menjadi faktor penting yang memengaruhi volatilitas inflasi, terutama di daerah seperti Kota Baubau. Ketergantungan masyarakat pada sumber daya laut sebagai komoditas utama menyebabkan fluktuasi pasokan yang cukup tinggi, sehingga berimbas langsung pada ketidakstabilan harga barang di pasar.

Fenomena ini sejalan dengan kajian Gali dan Monacelli (2005) yang menekankan bahwa volatilitas nilai tukar dan harga domestik dapat meningkat jika terdapat ketidakseimbangan dalam penawaran dan permintaan, terutama di negara kecil terbuka dengan pasar yang rentan terhadap gangguan eksternal. Ketidakpastian pasokan dapat memicu perubahan harga yang tajam, yang jika tidak diantisipasi dengan baik, akan memperburuk tingkat inflasi. Selain itu, perilaku konsumen yang cenderung adaptif namun sensitif terhadap perubahan harga juga turut memperkuat volatilitas inflasi.

Menurut studi Clarida et al. (1998), ekspektasi inflasi yang tidak stabil dapat menyebabkan

pelaku ekonomi mengambil keputusan konsumsi dan investasi yang tidak optimal, sehingga memperpanjang siklus ketidakstabilan harga. Rizani dkk. (2023) menyoroti bahwa konsumen di Indonesia secara aktif menyesuaikan pola belanja mereka sebagai respons terhadap perubahan inflasi, misalnya dengan memprioritaskan kebutuhan pokok dan mencari alternatif yang lebih ekonomis. Respons ini merupakan bagian penting dari dinamika ekonomi yang memengaruhi permintaan dan akhirnya harga di pasar. Dengan demikian, edukasi konsumen dan penyediaan informasi pasar yang akurat sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih rasional dan adaptif terhadap perubahan harga. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran penguatan informasi pasar dan edukasi konsumen sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi.

Hal ini sejalan dengan temuan Rotemberg dan Woodford (1997) yang menyatakan bahwa kebijakan moneter yang efektif harus diiringi dengan pengelolaan ekspektasi yang baik agar stabilitas harga dapat tercapai. Selain itu, integrasi data pasokan yang akurat dan real-time menjadi sangat penting untuk mengantisipasi fluktuasi harga, terutama komoditas utama yang menjadi tumpuan ekonomi daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring pasar bisa menjadi solusi untuk memperkecil gap antara kondisi riil dan kebijakan yang diambil. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan makro yang bersifat umum, tetapi juga pada pendekatan yang sensitif terhadap karakteristik lokal dan perilaku ekonomi masyarakat. Upaya untuk memahami dan mengelola dinamika ini secara holistik dapat meningkatkan efektivitas kebijakan serta menambah daya tahan ekonomi daerah terhadap gejolak harga.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau telah terlaksana dengan baik sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing bagian melalui pendekatan teoretis, namun masih menghadapi beberapa hambatan meliputi keterbatasan distribusi barang, kondisi cuaca yang ekstrem, serta rendahnya kesadaran sebagian pedagang dalam menjaga stabilitas harga. Guna mengatasi faktor penghambat tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya konkret, seperti intensifikasi sidak pasar, kerja sama dengan berbagai pihak, dan sosialisasi terhadap pelaku usaha. Adapun beberapa faktor yang menjadi pendukung terlaksananya pengendalian inflasi yang efektif meliputi ketersediaan data harga yang akurat, koordinasi yang baik dengan pihak terkait seperti distributor pangan, dan peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dalam meningkatkan pengendalian inflasi agar menjadi lebih efektif lagi kedepannya, disarankan pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dilakukan secara berkala dan intensif yang tadinya dilaksanakan tiap bulan menjadi tiap minggu yang difokuskan pada perencanaan dan evaluasi yang tepat agar intervensi pada pasar dapat dilakukan lebih efektif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam interpretasi hasil dan pengembangan studi selanjutnya. Pertama, data yang digunakan bersifat terbatas dan berfokus pada satu wilayah, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi untuk daerah lain dengan karakteristik ekonomi dan kelembagaan yang berbeda. Kedua, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan koordinasi dalam penerapan kebijakan moneter, tanpa menggali secara mendalam faktor-faktor mikroekonomi seperti perilaku individual pelaku pasar dan konsumen yang dapat memberikan gambaran lebih rinci mengenai mekanisme volatilitas harga. Selain itu, penelitian ini juga kurang menyoroti pengaruh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan nasional, dinamika ekonomi global, dan kejadian bencana alam yang bisa memengaruhi stabilitas inflasi di daerah. Terakhir, karena penelitian ini bersifat *cross-sectional*, maka gambaran dinamika jangka panjang terhadap pengendalian inflasi belum dapat diuraikan secara lengkap.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian pada lokasi yang sama dengan menggunakan teori analisis yang berbeda berkaitan dengan pengendalian inflasi dalam upaya stabilitas ekonomi di Kota Baubau untuk mendapatkan dan menemukan hasil yang lebih mendalam. Pertama, studi komparatif antar daerah dengan karakteristik

ekonomi dan kelembagaan yang berbeda dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang efektivitas kebijakan pengendalian inflasi secara nasional. Kedua, penelitian dengan pendekatan kuantitatif menggunakan *data time series* atau panel akan sangat membantu dalam menganalisis dinamika pengaruh kebijakan moneter dan variabel lain terhadap inflasi secara lebih mendalam dan jangka panjang. Ketiga, pendalaman terhadap perilaku mikroekonomi pelaku usaha dan konsumen dalam merespons perubahan harga serta pengaruh edukasi dan informasi pasar terhadap ekspektasi inflasi menjadi area penting yang perlu dieksplorasi. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi dan *big data* dalam monitoring pasar secara *real-time* dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan ketepatan dan responsivitas kebijakan pengendalian inflasi. Terakhir, kajian yang lebih spesifik mengenai dampak kebijakan moneter terhadap sektor-sektor ekonomi utama, seperti perikanan dan pertanian di daerah yang bergantung pada sumber daya alam, akan membantu merancang kebijakan yang lebih terarah dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau beserta jajarannya dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Baubau yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J., & Thaicharoen, Y. (2003). *Institutional causes, macroeconomic symptoms: volatility, crises and growth*. *Journal of Monetary Economics*, 50(1), 49–123. [https://doi.org/10.1016/S0304-3932\(02\)00208-8](https://doi.org/10.1016/S0304-3932(02)00208-8)
- Badan Pusat Statistik Kota Baubau. (2025). *Kota Baubau dalam angka 2025* (Volume 16, No. Publikasi 74720.25003; ISSN 2528-4681). BPS Kota Baubau. <https://baubaukota.bps.go.id>
- Barro, R. J., & Gordon, D. B. (1983a). *A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model*. *Journal of Political Economy*, 91(4), 589–610. <https://doi.org/10.1086/261167>
- Barro, R. J., & Gordon, D. B. (1983b). *Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy*. *Journal of Monetary Economics*, 12(1), 101–121. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(83\)90051-X](https://doi.org/10.1016/0304-3932(83)90051-X)
- Capistrán, C., & Ramos-Francia, M. (2010). *Does Inflation Targeting Affect the Dispersion of Inflation Expectations?*. *Journal of Money, Credit and Banking*, 42(1), 113–134. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4616.2009.00280.x>
- Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (2000). *Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory**. *Quarterly Journal of Economics*, 115(1), 147–180. <https://doi.org/10.1162/003355300554692>
- Clarida, R., Galí, J., & Gertler, M. (1998). *Monetary policy rules in practice*. *European Economic Review*, 42(6), 1033–1067. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(98\)00016-6](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(98)00016-6)
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). *Drifts and volatilities: monetary policies and outcomes in the post WWII US*. *Review of Economic Dynamics*, 8(2), 262–302. <https://doi.org/10.1016/j.red.2004.10.009>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- De Mendonça, H. (2007). *Towards credibility from inflation targeting: the Brazilian experience*. *Applied Economics*, 39(20), 2599–2615. <https://doi.org/10.1080/00036840600707324>
- Erceg, C. J., Henderson, D. W., & Levin, A. T. (2000). *Optimal monetary policy with staggered wage and price contracts*. *Journal of Monetary Economics*, 46(2), 281–313. [https://doi.org/10.1016/S0304-3932\(00\)00028-3](https://doi.org/10.1016/S0304-3932(00)00028-3)
- Fischer, S. (1993). *The role of macroeconomic factors in growth*. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 485–512. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(93\)90027-D](https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90027-D)
- Gali, J., & Monacelli, T. (2005). *Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open*

- Economy. Review of Economic Studies*, 72(3), 707–734. <https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2005.00349.x>
- George R. Terry. (2010). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Bumi Aksara
- Hibbs, D. A. (1977). *Political Parties and Macroeconomic Policy*. *American Political Science Review*, 71(4), 1467–1487. <https://doi.org/10.2307/1961490>
- Huberman, M. & M. (1994). *Qualitative Analysis Data*. Jakarta: UI Press. 10–12
- Kumaranayake, L. (2000). *The real and the nominal? Making inflationary adjustments to cost and other economic data*. *Health Policy and Planning*, 15(2), 230–234. <https://doi.org/10.1093/heapol/15.2.230>
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. In *Ilmu Pemerintahan*. RajaGrafindo Persada.
- Lucas, R. E., & Stokey, N. L. (1983). *Optimal fiscal and monetary policy in an economy without capital*. *Journal of Monetary Economics*, 12(1), 55–93. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(83\)90049-1](https://doi.org/10.1016/0304-3932(83)90049-1)
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia
- Pangesti, I., & Susanto, R. (2018). *Pengaruh Inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(1), 70. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i1.3164>
- Primiceri, G. E. (2005). *Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy*. *The Review of Economic Studies*, 72(3), 821–852. <https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x>
- Rizani, A., Norrahman, R. A., Harsono, I., Yahya, A. S., & Syifa, D. M. (2023). *Efek Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat pada Tinjauan Ekonomi Makro*. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 344–358. <https://doi.org/10.62504/4w0gee05>
- Rotemberg, J. J., & Woodford, M. (1997). *An Optimization-Based Econometric Framework for the Evaluation of Monetary Policy*. *NBER Macroeconomics Annual*, 12, 297–346. <https://doi.org/10.1086/654340>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik - Legalistik - Empirik - Inovatif* (2nd ed.). ALFABETA.
- Sims, C. A. (1992). *Interpreting the macroeconomic time series facts*. *European Economic Review*, 36(5), 975–1000. [https://doi.org/10.1016/0014-2921\(92\)90041-T](https://doi.org/10.1016/0014-2921(92)90041-T)
- Soekapdjo, S., & Oktavia, M. R. (2021). *Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia*. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 94–102. <https://doi.org/10.31294/eco.v5i2.10070>
- Svensson, L. E. O. (1997). *Inflation forecast targeting: Implementing and monitoring inflation targets*. *European Economic Review*, 41(6), 1111–1146. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(96\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(96)00055-4)
- Yenni, D. R., Agus, I., & Abdilla, M. (2019). *Pengaruh inflasi, kebijakan moneter dan pengangguran terhadap perekonomian indonesia*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(2), 283–293. <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/29>